



Article Informations  
Corresponding Email:  
alfarizioka12@gmail.com

Received: 10/02/2025; Accepted:  
20/02/2025; Published: 30/06/2025

## UPAYA PASUKAN UNIFIL DALAM MENCAPAI PERDAMAIAN DI LEBANON PADA TAHUN 2018 – 2020

**Mubaroka Alfarizi Ruswandi<sup>1)</sup>, Suwarti Sari<sup>2)</sup>, Jusmalia Oktaviani<sup>3)</sup>**

1,2,3)Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan  
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

### Abstrak

Konflik berkepanjangan yang terjadi di Lebanon menyebabkan terbentuknya mandat Resolusi DK PBB 1701 oleh UNIFIL tahun 2006. Pasukan UNIFIL merupakan sebuah misi pemeliharaan perdamaian yang didirikan PBB Tahun 1978, dengan tujuan untuk menjaga dan mewujudkan perdamaian serta keamanan di Lebanon Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana upaya yang dilakukan UNIFIL dalam mewujudkan perdamaian di Lebanon Tahun 2018-2020 dengan menggunakan teori konsep resolusi konflik menurut Johan Galtung. Penelitian ini menggunakan kerangka teori seperti pendekatan Liberalisme institusional, Konsep Organisasi Internasional, dan Konsep Resolusi Konflik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber seperti artikel jurnal, buku, maupun data resmi dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Upaya UNIFIL dalam mewujudkan perdamaian di Lebanon dilakukan melalui tiga indikator yaitu peace making seperti mengadakan pelatihan dan pertemuan, peace keeping seperti melakukan patroli dan pengawasan, serta peace building melalui kegiatan pelatihan serta proyek berdampak cepat (QIP).

**Kata Kunci** : Upaya, UNIFIL, Perdamaian, Konflik Lebanon

### Abstract

*The prolonged conflict in Lebanon led to the formation of the UNSC Resolution 1701 mandate by UNIFIL in 2006. The UNIFIL force is a peacekeeping mission established by the UN in 1978, with the aim of maintaining and realizing peace and security in South Lebanon. This study aims to analyze how UNIFIL's efforts to realize peace in Lebanon in 2018-2020 using the theory of conflict resolution concepts according to Johan Galtung. This study uses theoretical frameworks such as the*

*institutional Liberalism approach, the Concept of International Organizations, and the Concept of Conflict Resolution. Data collection techniques are carried out through literature studies from various sources such as journal articles, books, and official data from related agencies. The results of the study show that UNIFIL's efforts to realize peace in Lebanon are carried out through three indicators, namely peace making such as holding training and meetings, peace keeping such as conducting patrols and surveillance, and peace building through training activities and quick impact projects (QIP).*

**Keywords** : *Effort, United Nation Interim Force In Lebanon, Peace, Konflik Lebanon.*

## **PENDAHULUAN**

Mengacu pada pandangan tradisional, studi hubungan internasional meliputi aspek perang dan perdamaian, termasuk diplomasi, strategi, dan kerjasama antar negara. Konflik dipandang sebagai proses sosial di mana kelompok atau individu berjuang untuk memperoleh status, nilai, dan kekuasaan. Tujuan utama konflik adalah untuk mendapatkan keuntungan dan memaksa lawan untuk menyerah. Dampak dari konflik tentu saja membuat masyarakat merasa tidak aman karena adanya kekerasan, baik verbal maupun fisik, yang timbul akibat benturan selama konflik. Hal ini mengakibatkan perasaan terancam dalam diri individu diimana keberadaan situasi yang tidak aman dan penuh konflik menekankan pentingnya menciptakan makna perdamaian untuk mengarahkan hubungan internasional menuju kondisi yang stabil dan harmonis. Menurut salah satu tokoh yaitu Johan Galtung mendefinisikan perdamaian sebagai sebuah keadaan tanpa konflik, di mana tidak ada penggunaan kekuatan militer dan kekerasan. Berdasarkan interpretasi yang disampaikan oleh para tokoh perdamaian, dapat disimpulkan bahwa perdamaian adalah kondisi yang harmonis, adil, dan aman, bebas dari konflik militer dan kekerasan.

Lebanon merupakan sebuah negara di kawasan Timur Tengah yang telah mengalami berbagai fase konflik yang berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang. Konflik ini bermula dari perang dingin yang terjadi antara kelompok Muslim dan Kristen di Lebanon. Keberagaman penduduk Lebanon sangat berpengaruh baik menjelang maupun selama konflik dimana umat Kristen dan Muslim Sunni menjadi mayoritas di kota-kota pesisir, sedangkan Muslim Syiah terutama tersebar di seluruh Lebanon selatan dan Lembah Beqaa di bagian timur. Sementara itu, komunitas Druze dan Kristen mendiami daerah pegunungan di negara tersebut. Lebanon sendiri mulai terlibat dalam konflik Arab-Israel dan tidak dapat menghindari dampak dari serangan militer serta upaya ofensif yang dilakukan oleh negara-negara Arab. Berbatasan langsung dengan Israel, Lebanon menjadi salah satu lokasi penampungan bagi ribuan pengungsi Palestina yang melarikan diri karena ketakutan. Selain berfungsi sebagai tempat pengungsian, Lebanon juga menjadi basis bagi milisi Palestina. Akibat dari keterlibatan ini, Lebanon terus-menerus menjadi target serangan dari Israel.

Pada tahun 1968 terjadinya peristiwa pengahncuran 13 di Bandara Internasional Beirut serta beberapa desa yang dilakukan Israel sebagai

respon dari serangan oleh dua anggota Front Pembebasan Rakyat Palestina terhadap pesawat Israel di Athena. Kemudian pemerintah Lebanon menyetujui pembentukan milisi-milisi rakyat Palestina bersenjata untuk melawan Israel tanpa mengancam kedaulatan dan kesejahteraan Lebanon melalui penandatanganan "Kesepakatan Kairo". Kemudian pada 1978 terjadinya konflik antara pejuang Palestina yang tergabung dalam *Palestine Liberation Organization* dengan tentara Israel di Lebanon Selatan yang memicu Israel untuk melakukan invansi ke wilayah tersebut untuk menghadapi para pejuang Palestina.

Konflik di tahun tersebut kemudian mendorong PBB untuk membentuk misi perdamaian di Lebanon, yang dikenal sebagai *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL). Yang didasarkan pada mandat resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 425 dan 426, dengan tujuan memastikan penarikan pasukan Israel dari seluruh wilayah Lebanon, membantu memulihkan perdamaian dan keamanan di Lebanon, mendukung pengembalian kekuasaan pemerintah Lebanon, serta mengurangi konflik melalui pengawasan terhadap "blue line" yaitu garis penarikan mundur tentara Israel dari wilayah kedaulatan Lebanon.

Selanjutnya fase kedua konflik yang ditandai dengan pecahnya konflik besar pada 2006 yang melibatkan kelompok bersenjata yang ada di Lebanon yaitu Hizbollah. Konflik tersebut mengakibatkan terbentuknya mandat Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 oleh UNIFIL pada tahun 2006, yang bertujuan untuk menghentikan konflik antara Hezbollah dan Israel. Namun resolusi ini belum berhasil mencapai tujuannya karena pertikaian antara Hezbollah dan Israel tetap berlanjut di wilayah *blue line* pada tahun-tahun berikutnya. Pasukan UNIFIL (*United Nations Interim Force in Lebanon*) merupakan misi pemelihara perdamaian yang didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan Maret 1978, dengan tujuan menjaga perdamaian dan keamanan di Lebanon selatan. tiga tahun pertama kehadiran UNIFIL di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon, dikenal sebagai Garis Biru, fokus pasukan perdamaian PBB terbatas pada dua hal utama: memberikan perlindungan kepada penduduk setempat dan memberikan bantuan kemanusiaan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa meskipun pasukan Israel telah mundur dari Lebanon, kontrol atas area tersebut masih signifikan, baik oleh Tentara Pertahanan Israel maupun oleh kekuatan Lebanon secara *de facto*. Dalam rangka memastikan pengawasan dan mendorong perundingan dengan pemerintah Israel untuk segera meninggalkan Lebanon, Dewan Keamanan PBB telah melakukan langkah-langkah.

Hingga pada tahun 2000 Israel berhasil mundur dari wilayah tersebut yang menyebabkan diperbaharainya mandat UNIFIL oleh DK PBB melalui resolusi 1559 sebagai wujud langkah lanjutan dalam proses ini. Kawasan Lebanon menunjukkan kompleksitas yang menghambat upaya perdamaian meskipun dijaga oleh pasukan perdamaian dan diawasi secara ketat. Konflik-konflik minor yang sering pecah di sepanjang Blue Line seringkali mengakibatkan korban, termasuk dari pihak pasukan pengamat militer PBB. Hingga terjadi peristiwa Operasi Northern Shield yang di luncurkan Israel pada Desember 2018, bertujuan untuk menemukan dan menghancurkan terowongan yang

dibangun oleh Hezbollah dari Lebanon ke Israel. Selain itu, operasi ini juga bertujuan untuk mencegah potensi serangan dan memperkuat posisi defensif Israel di tengah ketegangan regional yang meningkat akibat dukungan Iran terhadap Hezbollah. Operasi ini merupakan bagian dari konflik yang lebih luas antara Iran dan Israel serta konflik Hezbollah dengan Israel (Yantina Debora, 2018).

Kemudian pada 2019 terjadinya peristiwa jatuhnya dua drone Israel di Beirut. Insiden ini memicu reaksi keras dari Presiden Lebanon, Michel Aoun, yang menyebutnya sebagai “deklarasi perang” dan menyerukan respons militer. Hezbollah kemudian mengancam untuk menembak jatuh setiap drone Israel yang melanggar ruang udara Lebanon, dan pada September 2019, mereka berhasil menjatuhkan sebuah drone Israel di wilayah selatan Lebanon. serangan ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk menanggapi aktivitas Hezbollah dan memperkuat posisi defensif Israel di perbatasan utara.

Hingga pada tahun 2020 terjadinya peningkatan ketegangan perbatasan di Lebanon dan Israel akibat dari adanya serangkaian insiden militer dan provokasi. Salah satu penyebab utama adalah serangan udara Israel ke wilayah Lebanon, yang dianggap sebagai respons terhadap ancaman dari Hezbollah. Pada bulan Agustus, setelah ledakan besar di Beirut, ketegangan semakin memuncak dengan serangan balasan dari Hezbollah terhadap posisi Israel. Selain itu, situasi di Gaza yang memburuk juga berkontribusi pada eskalasi konflik di perbatasan, meningkatkan kekhawatiran akan potensi perang regional yang lebih luas. Sebagai sekutu Hamas, Hezbollah meluncurkan serangan untuk mendukung warga Palestina yang terpengaruh oleh pengeboman Israel di Gaza. Selain itu, Israel menganggap Hezbollah sebagai ancaman utama karena persenjataan canggih yang dimilikinya dan aktivitas di sepanjang perbatasan. Ketidakstabilan regional dan dukungan Iran terhadap Hezbollah juga berkontribusi pada eskalasi konflik ini. Sehingga PBB memberikan beberapa solusi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi upaya *peace making*, *peace building*, *peace keeping*.

Penciptaan perdamaian (*peace making*) sering kali melibatkan serangkaian langkah untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung lama dan biasanya melibatkan upaya diplomasi untuk membantu pihak-pihak yang ingin mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Kemudian *Peacebuilding* bertujuan untuk mengurangi risiko terulangnya atau terulangnya konflik dengan memperkuat kapasitas nasional di semua tingkatan dalam pengelolaan konflik, dan meletakkan landasan bagi perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir *Peacekeeping* memiliki Peran utama penjaga perdamaian adalah untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas di wilayah konflik. Mereka melakukan patroli, pengawasan, dan intervensi yang diperlukan untuk mencegah eskalasi kekerasan dan konflik lebih lanjut. Berdasarkan penjelasan pada latar belakang tersebut, maka pembahasan dalam penelitian ini adalah bentuk upaya yang di berikan oleh pasukan UNIFIL terhadap konflik di Lebanon, yang di bentuk oleh PBB sebagai pasukan perdamaian dunia. Maka dari itu peneliti menganggakt judul, “Upaya Pasukan UNIFIL

Dalam Mencapai Perdamaian di Lebanon Pada Tahun 2018- 2020”(Kemenlu, 2019).

## **PEMBAHASAN**

### **Gambaran Konflik Lebanon**

Lebanon merupakan sebuah negara kecil di Timur Tengah yang dikenal dengan keragaman budaya dan etnisitasnya dan pernah menjadi destinasi unggulan di kawasan ini. Namun, kondisi tersebut tidak bertahan lama karena Lebanon berubah menjadi wilayah yang dilanda konflik bersenjata. Peperangan yang terus-menerus baik akibat konflik internal maupun eksternal, telah menyebabkan kerusakan besar baik dari segi korban jiwa maupun infrastruktur. Salah satu konflik terbesar yang menarik perhatian dunia adalah Perang Saudara Lebanon yang berlangsung dari 1975 hingga 1990. Konflik sipil di Lebanon yang sangat kompleks memiliki tiga faktor utama sebagai akar permasalahannya, yaitu ketidakmerataan pembagian kekuasaan, ketimpangan sosial-ekonomi antar kelompok, dan kedatangan pengungsi Palestina akibat perang Arab-Israel. Salah satu isu utama adalah ketidakadilan dalam pembagian kekuasaan yang diatur melalui Pakta Nasional (al-Misak al-Wataniya) yang disepakati setelah Lebanon merdeka dari Prancis pada 22 November 1943.

Pakta ini mendasari struktur politik Lebanon dengan mendistribusikan representasi kaum agama di pemerintahan dengan rasio 6:5 ( enam untuk Kristen Maronit dan lima untuk Muslim )berdasarkan sensus penduduk tahun 1932 yang mencatat Kristen Maronit sebagai kelompok mayoritas sebesar 30% dari populasi. Dominasi Kristen Maronit dalam pemerintahan dan parlemen awalnya diharapkan menciptakan stabilitas, tetapi dalam praktiknya justru menimbulkan ketegangan. Perjanjian ini tidak bersifat mengikat karena tidak tertulis, sehingga rentan diperdebatkan, terutama karena intervensi Prancis dalam proses pembuatannya sehingga memicu ketidakpuasan di kalangan kelompok lain di Lebanon (Ragis Bagus, 2011). Kaum Muslim yang merasa dirugikan oleh sistem pembagian kekuasaan berdasarkan Pakta Nasional menginginkan reformasi dalam sistem politik Lebanon, salah satunya melalui usulan sensus ulang. Namun, usulan ini ditolak oleh kaum Maronit karena perubahan demografi Lebanon dari waktu ke waktu cenderung mengancam dominasi mereka dalam pemerintahan. Akibatnya, muncul perbedaan kepentingan antara kaum Maronit yang ingin mempertahankan status quo dan kaum Muslim yang menginginkan perubahan. Sebagai kompromi, kaum Maronit mengusulkan perimbangan kekuatan di parlemen diubah dari rasio 6:5 menjadi 5:5, dengan syarat jabatan presiden tetap dipegang oleh Maronit. Akan tetapi usulan tersebut tetap ditolak oleh kaum Muslim di Lebanon.

Adanya ketimpangan ketimpangan sosial ekonomi yang mencolok. Kelompok yang menikmati manfaat dari kemajuan ekonomi Lebanon dan hidup dalam kemakmuran umumnya berasal dari komunitas Kristen, terutama Kristen Maronit, serta para Zuama. Sementara itu, kaum Muslim, yang sebagian besar tinggal di wilayah pesisir dan pedalaman selatan Lebanon, harus

berjuang keras untuk bertahan hidup dalam kemiskinan. Ketimpangan ini berakar dari kebijakan era penjajahan Prancis. Kemudian munculnya kedatangan para pengungsi Palestina ke Lebanon akibat konflik Palestina-Israel. Kehadiran mereka, terutama di wilayah selatan Lebanon, menyebabkan peningkatan signifikan dalam jumlah penduduk Muslim di negara tersebut. Lonjakan jumlah penduduk Muslim akibat kedatangan pengungsi Palestina menimbulkan kekhawatiran di kalangan Kristen Maronit, yang merasa posisinya dalam pemerintahan terancam.

Konflik sipil di Lebanon merupakan perang yang sangat kompleks karena melibatkan berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, seperti Suriah, Israel, Amerika Serikat, dan PBB, yang masing-masing memiliki agenda tersendiri. Konflik yang terjadi di Lebanon merupakan dampak dari Perang Saudara Lebanon yang berlangsung pada tahun 1975 hingga 1990, yang dipicu oleh pengaruh konflik regional di sekitarnya. Ketegangan tersebut semakin memanas dengan keterlibatan berbagai pihak lain, seperti Phalangist, Druze Forces, komunitas Maronit, dan Muslim Sunni. Selain itu, sejumlah negara, termasuk Suriah dan Israel, turut campur dalam konflik ini, yang kemudian menjadi latar belakang munculnya kelompok Hizbullah di Lebanon.

### **Faktor Pendorong Konflik Lebanon**

Lebanon mengalami situasi politik yang sangat sensitif, hal ini disebabkan oleh adanya berbagai komunitas religius tersebut yang memiliki orientasi politik untuk mendominasi pemerintahan Lebanon. Oleh sebab itu, sistem politik Lebanon didasarkan pada pemikiran religius, karena apabila keseimbangan ini terganggu maka harmoni kehidupan di Lebanon dan bahkan keutuhan Lebanon sebagai sebuah entitas negara pun dapat terganggu. Akan tetapi konflik politik yang terjadi di Lebanon bukan murni sebagai perang saudara karena ada pihak dari luar Lebanon yang terlibat di dalamnya diantaranya adalah Suriah, Israel dan PLO serta dari barat yang selalu berusaha untuk memanfaatkan rapuhnya Lebanon sebagai salah satu upaya intervensi terhadap negara-negara di Timur Tengah. Pengaruh yang besar dari luar Lebanon yang datang dari negara tetangga yaitu, Suriah dan Iran yang menambah kompleksitas konflik karena kedekatan historis dari kedua negara tersebut.

Selanjutnya adalah kekuatan militer hizbulloh, dimana Hizbulloh sendiri merupakan kelompok Syiah Lebanon yang muncul dan menguat pasca-revolusi Islam Iran (lahir tahun 1983), kemudian dewasa ini posisi Hizbullah sendiri menguat pasca-konflik dengan Israel pertengahan tahun 2006 dengan Iran merupakan pendukung utama Hezbollah sekaligus pemasok senjata dan dana. Hizbullah menguasai kawasan Lebanon Selatan dan secara konsisten menggunakan wilayah tersebut sebagai basis perlawanan terhadap Israel, bahkan Hizbullah juga mendapatkan dukungan dari Suriah yang sekaligus merupakan penghubung mereka dengan Iran, Kontrol Hizbullah atas wilayah Lebanon Selatan dimungkinkan karena lemahnya kemampuan pemerintah Lebanon yang terkoyak akibat perang saudara dan kuatnya intervensi Suriah yang mendorong penguatan Hizbullah. Krisis politik di Lebanon mencapai puncaknya ketika pada pertengahan bulan Mei 2008

pemerintah Libanon mengeluarkan dua kebijakan yang berisi tentang pembekuan sarana komunikasi Hizbullah dan pemberhentian kepala keamanan bandara internasional Rafik Hariri (yang dekat dengan Hizbullah) yang menimbulkan kemarahan dari Hizbullah yang mengakibatkan terjadinya bentrok antara koalisi oposisi yang di motori Hizbullah dengan kelompok milisi pendukung koalisi partai-partai yang berkuasa atau kelompok mayoritas yang berlangsung selama kurang lebih sepekan di kota Beirut, bahkan kerusuhan sampai meluas ke pegunungan Libanon (Pegunungan Ahad) sampai ke wilayah utara yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa lebih dari 300 orang serta menyebabkan kelumpuhan total di Beirut.

Kemudian adalah sengketa wilayah dimana pada 2011 sampai 2013 terjadinya ketegangan politik yang berkelanjutan dan berakhir dengan intervensi kekuatan asing. Intervensi ini dimotivasi oleh kekhawatiran tentang peran Libanon karena menampung banyak pengungsi Suriah dan pasukan penjaga perdamaian internasional di selatan, serta oleh kebutuhan untuk menyelesaikan sengketa maritim antara Libanon dan Israel atas eksploitasi ladang gas yang baru ditemukan di Mediterania Timur.

### **Dinamika Konflik Libanon**

Libanon terlibat dalam konflik Arab-Israel pada Juni 1967. Libanon juga merasakan invasi militer Arab terhadap Israel karena berbatasan langsung dengan negara itu. Selain itu, Libanon adalah rumah bagi ribuan pengungsi Palestina yang melarikan diri dari tanah air mereka karena ketakutan dan eskalasi kekerasan. Pada tahun 1968, sebagai tanggapan atas serangan dua anggota Front Pembebasan Rakyat Palestina terhadap pesawat Israel di Athena, Israel meledakkan tiga belas pesawat di Bandara Internasional Beirut dan beberapa desa lainnya. Setelah berdirinya Negara Israel pada tahun 1948, Libanon menjadi tujuan utama pengungsi Palestina, termasuk milisi-milisi seperti Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Kelompok-kelompok ini melancarkan serangan terhadap Israel dari wilayah Libanon, yang kemudian menyeret Libanon ke dalam konflik. Sebagai respon, pada tahun 1978 Israel melancarkan invasi pertama ke Libanon. Pasukan Israel memasuki Libanon selatan hingga ke wilayah utara Sungai Litani dan membentuk zona penyangga yang diduduki hingga tahun 2000. Invasi ini bertujuan untuk menghentikan serangan gerilyawan Palestina yang dianggap mengancam perdamaian Israel dan kawasan Timur Tengah. Konflik tersebut menyebabkan lebih dari 2.000 korban jiwa di pihak Libanon, sementara 18 tentara Israel tewas.

Kemudian Perang Libanon 1982 adalah konflik tiga bulan yang dipicu oleh invasi Israel ke Libanon, yang dirancang untuk melemahkan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) secara militer dan politik dan mengubah Perang Saudara Libanon demi kepentingan sekutu sayap kanan Israel. Ini menambah kekuatan militer lain ke konflik di jantung kota Beirut yang mencakup pasukan Suriah, berbagai milisi Libanon, dan, akhirnya, pasukan penjaga perdamaian multinasional. Perjanjian gencatan senjata Israel-PLO yang direkayasa secara tidak langsung oleh pemerintah Amerika pada bulan

Juli 1981 menyebabkan periode perdamaian di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon. Namun, pada tanggal 6 Juni 1982, pemerintah Israel menggunakan dalih percobaan pembunuhan duta besar Israel di London oleh kelompok Palestina anti-PLO untuk melancarkan invasi ke Lebanon. Pada tahun 1985, Israel membangun zona keamanan di sekitar Sungai Litani sebagai respons terhadap meningkatnya serangan dari Hizbullah dan untuk melindungi perbatasan utara Israel. Langkah ini diambil setelah Israel mundur dari Lebanon selatan, dengan tujuan menciptakan area yang aman dari ancaman militan. Zona ini juga dimaksudkan untuk mencegah Hizbullah mengakses wilayah yang lebih dekat ke perbatasan Israel, sekaligus memperkuat posisi strategis Israel di kawasan tersebut.

Hizbullah kemudian merespon dengan meningkatkan ancaman dan kesiapan militer. Mereka menolak untuk menarik pasukannya dari wilayah tersebut, yang sesuai dengan resolusi PBB, dan menyatakan bahwa mereka akan melanjutkan perlawanan terhadap Israel jika diperlukan. Pada bulan Juli 1993, Israel menyerang Lebanon dalam apa yang disebut "Operasi Akuntabilitas", yang dikenal sebagai Perang Tujuh Hari di Lebanon. Dan pada tahun 1996, Israel melancarkan Operasi Grapes of Wrath di Lebanon dengan memulai serangan udara yang menjatuhkan bom di Beirut bagian selatan, Bekaa, dan Nabatiyeh. Serangan ini menargetkan 147 desa dan kota, sehingga memaksa lebih dari 400 ribu warga Lebanon mengungsi.

Pada tahun 1999, Israel melancarkan serangan udara terhadap infrastruktur sipil di dekat Tripoli, Lebanon. Serangan ini ditujukan untuk menekan pemerintah Lebanon agar mengambil tindakan lebih tegas terhadap keberadaan Hizbullah. Sepanjang tahun 1999, Israel menggunakan serangan udara sebagai respons terhadap serangan-serangan Hizbullah. Konflik ini berlanjut hingga tahun 2000 ketika Perdana Menteri Israel saat itu, Ehud Barak, memutuskan untuk menarik pasukan Israel dari Lebanon selatan sebagai bagian dari janji kampanye pemilihannya. Konflik antara Israel dan Lebanon pada tahun 2006, yang dikenal sebagai Perang Lebanon 2006, adalah sebuah pertempuran bersenjata yang berlangsung selama 34 hari, dari 12 Juli hingga 14 Agustus. Perang berlanjut terjadilah pertempuran sengit terjadi di sepanjang perbatasan, dengan Hizbullah membalas serangan dengan peluncuran roket ke wilayah utara Israel.

Pada bulan September 2018, terjadi serangan balasan yaitu serangkaian serangan roket dari Hizbullah ke wilayah utara Israel sebagai respons terhadap serangan udara Israel yang menargetkan infrastruktur militer Hizbullah di Lebanon, Israel melancarkan operasi militer terbatas di Lebanon, menargetkan terowongan dan fasilitas militer Hizbullah. Ini termasuk serangan udara yang menyebabkan kerusakan pada infrastruktur dan mengakibatkan korban jiwa. Meskipun tidak terjadi perang besar seperti pada tahun 2006, insiden-insiden kecil menunjukkan bahwa situasi di perbatasan tetap rentan terhadap eskalasi. Hingga Pada tanggal 4 Agustus 2020, terjadinya ledakan massal di Pelabuhan Beirut yang menyebabkan kerusakan besar-besaran dan korban jiwa. Ledakan ini disebabkan oleh penyimpanan ammonium nitrat yang rusak di gudang pelabuhan. Akibatnya, hampir 200 orang tewas, ribuan orang terluka, dan lingkungan sekitar ibu

kota Lebanon hancur total. Meskipun tidak ada konflik langsung antara Israel dan Lebanon pada tahun 2020, namun konteks geopolitik yang kompleks membuat kedua negara tetap dalam posisi tegang.

### **Misi Perdamaian PBB Di Lebanon Melalui UNIFIL**

PBB sebagai salah satu organisasi internasional terbesar di dunia memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk bisa berkontribusi dalam upaya pemeliharaan dan perwujudan perdamaian di lingkup internasional, terutama di negara – negara yang rentan terhadap konflik. Hal itupun kemudian dibuktikan dengan adanya pasukan perdamaian yang dibentuk oleh PBB. PBB sendiri mendefinisikan pasukan perdamaian sebagai sebuah upaya untuk memberikan bantuan bagi negara – negara yang sedang berkonflik dalam upaya menciptakan perdamaian. Pasukan perdamaian tersebut memiliki tugas untuk bisa mengawasi serta memantau proses perdamaian di negara yang berkonflik. Pasukan perdamaian juga terbukti menjadi salah satu instrumen paling efektif untuk membantu negara yang terkena konflik mencari jalan keluar terhadap upaya perwujudan perdamaian suatu negara.

Salah satu pasukan perdamaian PBB tersebut yaitu UNIFIL. United Nations Interim Force in Lebanon atau yang dikenal dengan istilah UNIFIL adalah pasukan penjaga perdamaian yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengawasi situasi di Lebanon, khususnya di wilayah perbatasan dengan Israel. UNIFIL didirikan pada 19 Maret 1978 berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 425 dan No. 426. Pasukan pertama UNIFIL tiba di Lebanon pada 23 Maret 1978 setelah serangkaian serangan antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang menyebabkan ketegangan di kawasan tersebut.

Pembentukan UNIFIL pada 19 Maret 1978 melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 425 dan 426 dipicu oleh invasi Israel ke Lebanon. Mandat awalnya adalah untuk mengkonfirmasi penarikan pasukan Israel dan memulihkan perdamaian dan keamanan Internasional, membantu Pemerintah Lebanon. Pada 12 Juli 2006, perang kembali meletus setelah Hizbullah menyerang patroli IDF yang menewaskan tiga tentara dan menculik dua orang. Oleh karena itu, pada 11 Agustus 2006, Dewan Keamanan mengadopsi resolusi 1701, yang mengakhiri perang dan Dewan memperluas kekuatan UNIFIL dari 2.000 menjadi 15.000 tentara dan meningkatkan mandatnya. Keputusan Dewan Keamanan PBB Resolusi 425 dan 426 pada awalnya mengamanatkan UNIFIL untuk konfirmasi penarikan pasukan Israel dari Lebanon selatan, mengembalikan perdamaian dan keamanan Internasional, membantu Pemerintah Lebanon dalam memastikan kembalinya kewenangan efektifnya di wilayah tersebut.

UNIFIL memiliki beberapa tugas dan misi utama yang telah ditetapkan, terutama setelah pembaruan mandat pada tahun 2006, beberapa misi tersebut diantaranya yaitu, memantau penarikan pasukan Israel, memulihkan perdamaian dan keamanan internasional, mendukung pemerintah Lebanon, mengawasi penghentian permusuhan, memberikan

bantuan kemanusiaan, membantu pembentukan zona demiliterisasi, pengamanan perbatasan, dan koordinasi kegiatan militer (CNN, 2024).

## **Upaya Pasukan UNIFIL Dalam Mencapai Perdamaian Terhadap Konflik Di Lebanon**

Dalam menganalisis dan memaparkan mengenai upaya UNIFIL dalam mencapai perdamaian pada konflik Lebanon, peneliti menggunakan teori konsep resolusi konflik yang dikemukakan oleh Johan Galtung dimana UNIFIL menjalankan perannya sebagai mediator dalam konflik di Lebanon, mulai dari tindakan menjaga perdamaian (*peacekeeping*), upaya menciptakan perdamaian melalui dialog dan negosiasi (*peacemaking*), hingga pembangunan struktur yang mendukung perdamaian jangka panjang (*peacebuilding*).

### **1. Peace Keeping**

*Peacekeeping* adalah proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral. *Peacekeeping* melibatkan pengiriman personel militer, polisi, dan sipil untuk memantau situasi perdamaian dan mendukung proses perdamaian, tanpa menggunakan kekuatan bersenjata. Operasi ini bersifat sukarela dan bergantung pada persetujuan negara yang terlibat.

- **Patroli dan Pengawasan Di Wilayah Blue Line Sungai Litani**  
UNIFIL terus memprioritaskan kegiatan operasionalnya dengan melaksanakan patroli, terutama patroli jalan kaki di sepanjang Garis Biru. Selain itu, UNIFIL juga memperluas cakupan patroli malam hari dan meningkatkan penggunaan aset udara untuk keperluan pengintaian. Dalam periode tertentu, jam terbang untuk pengintaian mengalami peningkatan signifikan, dari rata-rata 36 jam per bulan pada Juli–Oktober 2017 dan 54 jam per bulan pada Maret–Juni 2018 menjadi 63 jam per bulan pada Juli–September 2018. UNIFIL juga menjalin kerja sama yang erat dengan Angkatan Bersenjata Lebanon (LAF) melalui pertemuan rutin bulanan dan pelaksanaan kegiatan operasional gabungan. Selain itu, UNIFIL aktif berkomunikasi dengan para pemimpin masyarakat setempat untuk menangani isu-isu sensitif yang melibatkan warga lokal dan menjaga stabilitas di wilayah tersebut. Jumlah kegiatan operasional bulanan UNIFIL mengalami peningkatan dari 13.362 pada Agustus 2017 menjadi 14.871 pada Mei 2018, dengan peningkatan sebesar 68 persen dalam patroli jalan kaki dan peningkatan 28 persen dalam rata-rata jam terbang patroli udara pengintaian. Lebih dari sepertiga dari seluruh kegiatan ini dilakukan pada malam hari.

- **Menjaga Keamanan Selama Pemilu Tahun 2018.**  
Pemilu Lebanon 2018, yang berlangsung pada 6 Mei 2018, merupakan momen penting bagi negara tersebut. Ini adalah pemilu pertama setelah periode panjang konflik dan ketegangan politik, serta setelah penerapan undang-undang pemilihan baru yang mengubah sistem pemilihan menjadi proporsional. Pemilu ini diadakan dalam situasi yang penuh tantangan, termasuk krisis ekonomi yang mulai melanda Lebanon. Dalam rangka

memastikan stabilitas selama periode pemilu, UNIFIL berupaya meningkatkan kehadiran Angkatan Bersenjata Lebanon serta lembaga keamanan lainnya. Setelah pendirian pusat kerja sama sipil-militer regional Angkatan Bersenjata Lebanon di Marjayoun, UNIFIL memperkuat keterlibatannya dengan pusat tersebut melalui identifikasi area untuk kegiatan bersama serta penerapan pendekatan terkoordinasi dalam mendukung masyarakat di wilayah operasionalnya. Pejabat dari pusat kerja sama ini turut berpartisipasi dalam rapat koordinasi kerja sama sipil-militer yang diselenggarakan oleh UNIFIL. Selain itu, UNIFIL dan UNSCOL terus menjalin komunikasi dengan perwakilan Pemerintah Lebanon, Dewan Keamanan PBB, serta negara-negara penyumbang pasukan.

- Inspeksi dan Operasi Anti Peluncuran Roket.

UNIFIL telah menjalankan berbagai operasi antipeluncuran roket sebagai bagian dari upayanya untuk menjaga stabilitas dan keamanan di Lebanon selatan. Operasi ini bertujuan untuk mencegah peluncuran roket yang dapat mengancam keamanan kawasan, terutama serangan yang berasal dari kelompok bersenjata seperti Hizbullah terhadap Israel. Dalam menjalankan operasi ini, UNIFIL bekerja sama erat dengan Angkatan Bersenjata Lebanon (LAF). Inspeksi rutin dilakukan di area strategis yang berpotensi digunakan untuk peluncuran roket. Operasi antipeluncuran roket yang dilaksanakan oleh UNIFIL merupakan bagian integral dari misinya dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di Lebanon selatan. Dengan bekerja sama dengan LAF, serta melakukan patroli dan pengawasan intensif, UNIFIL berusaha mengurangi risiko serangan dan memastikan bahwa situasi keamanan di kawasan tetap terkendali.

## **2. Peace Making**

*Peacemaking* merujuk pada upaya untuk menciptakan dan mempertahankan perdamaian di Lebanon, khususnya di wilayah selatan yang berbatasan dengan Israel. Upaya ini melibatkan berbagai inisiatif untuk menjaga stabilitas di Lebanon selatan melalui pemantauan, dukungan terhadap pemerintah setempat, serta pencegahan potensi kekerasan.

- Pelatihan Dan Kerjasama

Kepala Misi dan Komandan Pasukan juga terus berkoordinasi dengan kedua belah pihak secara bilateral untuk memfasilitasi solusi yang dapat diterima bersama untuk wilayah-wilayah yang disengketakan di sepanjang Garis Biru, dengan menekankan langkah-langkah membangun kepercayaan. Personel UNIFIL juga sering mengadakan pertukaran bilateral dengan Angkatan Bersenjata Lebanon dan Pasukan Pertahanan Israel, termasuk mengenai pengaturan taktis yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan yang berkaitan dengan pelanggaran berulang atau insiden tertentu di dekat Garis Biru.

- Pertemuan Tripartit

Pertemuan Tripartit UNIFIL merupakan forum yang melibatkan tiga pihak utama, yaitu Angkatan Bersenjata Lebanon (LAF), Angkatan Pertahanan Israel (IDF), dan UNIFIL itu sendiri. Tujuan utama pertemuan ini adalah untuk membahas berbagai isu terkait keamanan di perbatasan Lebanon-Israel, khususnya di sepanjang Garis Biru, serta memastikan implementasi

Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701. Forum ini menjadi wadah untuk mendiskusikan perkembangan situasi keamanan, kemungkinan pelanggaran, serta langkah-langkah pencegahan guna menghindari eskalasi konflik. Melalui keterlibatan ketiga pihak, pertemuan ini bertujuan meningkatkan koordinasi operasional antara LAF dan IDF di bawah pengawasan UNIFIL, sehingga dapat mengurangi risiko kesalahpahaman atau konfrontasi di lapangan. UNIFIL secara rutin mengadakan pertemuan tripartit untuk membahas koordinasi, pelanggaran terhadap Resolusi 1701, serta langkah-langkah dalam meredakan ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat.

- **Operasi Interdiksi Maritim**

Operasi Interdiksi Maritim yang dilaksanakan oleh UNIFIL bertujuan untuk mencegah masuknya senjata ilegal dan material terkait ke Lebanon melalui jalur laut. Operasi ini dirancang untuk menghentikan penyelundupan senjata serta barang ilegal lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok bersenjata seperti Hizbullah. Dengan mengawasi perairan Lebanon, UNIFIL berupaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan stabil serta mendukung perdamaian di wilayah yang rawan konflik. Selama periode pelaporan, UNIFIL, bekerja sama dengan Angkatan Bersenjata Lebanon, termasuk Angkatan Laut Lebanon, mendukung upaya peningkatan kapasitas pertahanan maritim negara tersebut. Satuan Tugas Maritim UNIFIL melaksanakan operasi interdiksi di seluruh wilayah operasional maritim dengan rata-rata memanggil 21 kapal per hari. Dari total 2.292 kapal yang dipanggil dalam periode ini, sebanyak 649 kapal telah diperiksa dan diberikan izin oleh otoritas Lebanon. Pada 17 Februari, UNIFIL terdiri dari 10.315 personel militer dari 43 negara penyumbang pasukan, termasuk 522 perempuan (5 persen). Selain itu, terdapat 239 staf internasional, termasuk 83 perempuan (35 persen), serta 576 staf sipil nasional, termasuk 153 perempuan (27 persen). Satuan Tugas Maritim UNIFIL mencakup enam kapal, dua helikopter, serta 768 personel militer, termasuk 29 perempuan (4 persen).

### **3. *Peace Building***

Pembinaan perdamaian (*peace building*) merupakan serangkaian upaya yang dirancang untuk mencegah munculnya kembali atau berlanjutnya konflik bersenjata dengan membangun fondasi perdamaian yang berkelanjutan. Proses ini bersifat kompleks dan multidimensional, bertujuan menciptakan kondisi yang mendukung stabilitas jangka panjang.

- **Kegiatan Pelatihan Masyarakat Sipil Tahun 2018 – 2020**

UNIFIL terus menunjukkan kemajuan dalam implementasi rekomendasi yang berkaitan dengan kegiatan penjangkauan masyarakat. Sebagai bagian dari upaya ini, UNIFIL telah menyusun daftar proyek berdampak cepat untuk periode 2018–2019, dengan prioritas pada desa-desa yang dianggap sensitif di sepanjang Garis Biru serta wilayah yang ditempati batalion yang memiliki keterbatasan atau tidak memiliki dana proyek nasional. Selain itu, UNIFIL semakin memperkuat keterlibatan Angkatan Bersenjata Lebanon dalam berbagai kegiatan komunitas dan program tanpa biaya, seperti patroli pasar. Upaya ini mencakup latihan pemadaman kebakaran dan operasi

penyelamatan. Pada 16 dan 17 Januari, UNIFIL memberikan pelatihan pertolongan pertama dan tanggap kecelakaan lalu lintas kepada personel pertahanan sipil Lebanon. Untuk mendukung implementasi Resolusi 1325 (2000) tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan, sebanyak 2.423 personel militer dan sipil UNIFIL, termasuk 145 perempuan (6 persen), telah mengikuti pelatihan UNIFIL mengenai pengarusutamaan gender.

- **Proyek Berdampak Cepat (*Quick Impact Progres*)**

Proyek Dampak Cepat (*Quick Impact Projects/QIP*) merupakan inisiatif berskala kecil yang dapat dilaksanakan dalam waktu singkat dan bertujuan untuk melengkapi, bukan menggantikan, program pembangunan jangka panjang yang dijalankan oleh berbagai lembaga dan pemangku kepentingan lainnya. QIP dirancang untuk mengatasi kebutuhan mendesak masyarakat serta mendukung pemerintah daerah, sekaligus memperkuat penerimaan terhadap pasukan penjaga perdamaian dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan mandat. QIP bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan layanan dasar serta infrastruktur yang diperlukan. Karena sifatnya yang cepat diimplementasikan, proyek ini dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam situasi pasca-konflik atau krisis. QIP merespons kebutuhan yang disampaikan oleh masyarakat setempat dan mencakup berbagai jenis kegiatan, seperti renovasi sekolah dan penyediaan titik akses air bersih bagi perempuan. QIP biasanya dilaksanakan melalui pemerintah daerah, organisasi nonpemerintah, serta organisasi akar rumput, dengan batas pendanaan maksimum sebesar US\$ 50.000 dan durasi proyek hingga enam bulan.

## **KESIMPULAN**

Konflik yang terjadi di Lebanon menyebabkan terbentuknya mandat Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 oleh UNIFIL pada tahun 2006, yang bertujuan untuk menghentikan konflik antara Hezbollah dan Israel. Namun, resolusi ini belum berhasil mencapai tujuannya karena pertikaian antara Hezbollah dan Israel tetap berlanjut di wilayah blue line pada tahun-tahun berikutnya. Pasukan UNIFIL (*United Nations Interim Force in Lebanon*) merupakan misi pemelihara perdamaian yang didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan Maret 1978, dengan tujuan menjaga perdamaian dan keamanan di Lebanon selatan. Misi ini dibentuk sebagai respons terhadap konflik yang terjadi antara Israel dan kelompok militan Palestina di daerah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwasanya dalam usaha meredam dan mewujudkan perdamaian di Lebanon tersebut, UNIFIL melakukan beberapa upaya yang didasarkan pada konsep Resolusi Konflik yang dikemukakan oleh Johan Galtung diantaranya yaitu *Peace Keeping* seperti patrol dan pengawasan di wilayah garis blue line dan sungai litani, menjaga keamanan selama pemilu tahun 2018, inspeksi dan operasi anti peluncuran roket, *Peace Making* seperti pelatihan dan kerjasama, pertemuan tripartit, dan operasi interdiksi maritim, *Peace Building* seperti kegiatan pelatihan masyarakat sipil pada tahun 2018, dan proyek berdampak cepat (QIP).

## DAFTAR PUSTAKA

- (ACRPS), the Arab Center for Research and Policy Studies. "The Lebanon Uprising: Causes and Ramifications." *Arab Center Washington DC*. Doha, 23 Oct. 2019. Available: <https://arabcenterdc.org/resource/the-lebanon-uprising-causes-and-ramifications/>.
- Andrea Fabi. "UNIFIL: Evolution of a Peacekeeping Mandate" (2020): 14. Available: <https://www.coespu.org/articles/unifil-evolution-peacekeeping-mandate>.
- CNN INDONESIA. "Sejarah Panjang Konflik Israel vs Lebanon-Hizbullah." *cnn Indonesia*. Jakarta, 28 Sep. 2024. Available: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240927145916-120-1149121/sejarah-panjang-konflik-israel-vs-lebanon-hizbullah>.
- Commander, Force, and Armed Forces. "Security Council" 11711. July (2018).
- Commander, Force. "Security Council" 19484. November (2018).
- Galtung, Johan, and Dietrich Fischer. "Conflict Transformation by Peaceful Means (The Transcend Method)" (2013): 59–69.
- INDONESIA, KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK. "Indonesia dan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB." *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*, 2019. Online. Internet. 2 Feb. 2025. . Available: [https://kemlu.go.id/portal/id/read/91/halaman\\_list\\_lainnya/indonesia-dan-misi-pemeliharaan-perdamaian-pbb](https://kemlu.go.id/portal/id/read/91/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-misi-pemeliharaan-perdamaian-pbb).
- Nations, United et al. "Security Council" 1701. March (2020): 1–21.
- nn. "Apa itu UNIFIL, Pasukan Perdamaian PBB yang Ada di Lebanon?" *cnn Indonesia*. Jakarta, 2024. Available: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20241011215054-120-1154537/apa-itu-unifil-pasukan-perdamaian-pbb-yang-ada-di-lebanon>.
- Report, Security Council. "UN Interim Force in Lebanon (UNIFIL): Vote on Mandate Renewal." *Security Council Report*, 2024. Online. Internet. 24 Jan. 2025. . Available: <https://www.securitycouncilreport.org/whatsinblue/2024/08/un-interim-force-in-lebanon-unifil-vote-on-mandate-renewal-4.php>.